

ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan langkah lembaga negara untuk menjamin keamanan warga negara dari kejahatan, khususnya bagi kelompok beresiko seperti anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh polisi kepada anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Banjarnegara serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi polisi. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara langsung dengan informan yaitu Kepala Unit PPA Polres Banjarnegara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual melalui 2 (dua) bentuk yaitu perlindungan preventif melalui kampanye *rise and speak* dan perlindungan hukum represif yaitu berupa penanganan perkara dengan cepat, memperlakukan anak sesuai dengan umurnya, penghindaran publikasi, dan pendampingan oleh orang tua atau wali. Faktor penghambat yang dialami polisi dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan adalah ketidaktahuan masyarakat itu sendiri mengenai prosedur penanganan perkara selain itu masih banyak masyarakat yang menganggap kekerasan seksual adalah sebuah aib. Berdasarkan hasil penelitian sebaiknya Polres Banjarnegara memperluas jangkauan masyarakat sebagai sasaran upaya preventif secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Anak Korban; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

Legal protection is a measure taken by state institutions to ensure the safety of citizens from crime, especially for at-risk groups such as children. This study aims to examine the forms of legal protection provided by the police to child victims of sexual violence in the jurisdiction of the Banjarnegara Police and to identify the obstacles faced by the police. The type of research used is empirical juridical with a descriptive analytical research specification. The data sources used are primary and secondary data. The data collection method was conducted through direct interviews with informants, namely the Head of the PPA Unit of the Banjarnegara Police. The results of the study show that the police provide legal protection to child victims of sexual violence in two forms, namely preventive protection through the Rise and Speak campaign and repressive legal protection in the form of rapid case handling, treating children according to their age, avoiding publicity, and providing assistance from parents or guardians. The obstacles faced by the police in providing legal protection to child victims of violence are the community's lack of knowledge about case handling procedures and the fact that many people still consider sexual violence to be a disgrace. Based on the results of the study, the Banjarnegara Police should expand the reach of the community as the target of continuous preventive efforts.

Keywords: Chikd Victims; Sexual Violence; Legal Porection.